

**RENJA SKPD  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2019**



**Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 12 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21556**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	Hal ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	21
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	28

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) Tahun 2019 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas PPKBPPPA Tahun 2019 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - m. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- t. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan serta merumuskan program pembangunan tahun

2019, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan strategi dan kebijakan perumusan program dilakukan melalui evaluasi pembangunan sosial tahun lalu, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu yaitu untuk tahun anggaran 2017 dari 38 kegiatan yang direncanakan dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2017 :

**Tabel 2.1  
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017**

#### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada SEKRETARIAT Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Belanja Tidak Langsung 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan	3.761.917.000 1.473.561.000	3.375.794.133 1.211.070.685	84,57 82,19	100 100
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.173.500	2.075.550	95,49	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.800.000	32.075.449	49,50	100
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.920.000	9.661.900	57,10	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	9.841.500	9.822.700	99,81	100
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.150.000	8.150.000	100	100
	6. Penyediaan alat tulis kantor	24.517.100	24.517.100	100	100
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.925.000	9.925.000	100	100
	8. Penyediaan komponen instalasi/	1.851.000	1.851.000	100	100



No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	penerangan bangunan kantor				
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37.977.000	37.677.000	99,21	100
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000	1.995.000	92,36	100
	11. Penyediaan makanan dan minuman	9.405.000	8.730.000	92,82	100
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	298.300.300	298.300.300	100	100
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	30.570.000	29.150.000	95,35	100
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	38.350.000	34.439.000	89,80	100
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	69.423.400	69.299.000	99,72	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.500.000	49.818.662	94,89	100
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.952.000	2.952.000	100	100
<b>JUMLAH</b>		<b>5.915.293.800</b>	<b>5.217.234.479</b>	<b>88,20</b>	<b>100</b>

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG KELUARGA BERENCANA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program keluarga berencana				
	1. Kegiatan Pembinaan keluarga berencana	297.450.300	269.607.500	90,64	100
	2. Kegiatan Kemitraan antar lembaga dan institusi dalam pelayanan program	25.600.000	24.880.000	97,19	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Keluarga Berencana				
	3. Kegiatan Pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan	8.720.000	7.970.000	91,40	100
	4. Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat dan Petugas Lini	24.336.000	24.270.000	99,73	100
	5. Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB	964.000.000	827.470.000	85,84	100
	6. Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB	673.080.000	529.401.280	78,65	80
2	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				
	1. Kegiatan Forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah	17.981.760	17.776.800	98,86	100
	2. Kegiatan Capacity building pendewasaan usia perkawinan	5.319.020	5.238.900	98,49	100
	3. Kegiatan Temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja	9.813.020	9.497.100	96,78	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.026.300.100</b>	<b>1.716.111.580</b>	<b>84,69</b>	<b>97,78</b>

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri				
	1. Kegiatan Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	199.448.640	196.938.640	98,74	100
<b>JUMLAH</b>		<b>199.448.640</b>	<b>196.938.640</b>	<b>98,74</b>	<b>100</b>

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				
	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12.603.200	12.603.200	100	100
	2. Kegiatan Pembinaan Desa P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	52.737.000	51.686.920	98,01	100
	3. Kegiatan Pembinaan KSI (Kecamatan Sayang Ibu)	19.652.400	19.652.400	100	100
	4. Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan	120.510.280	120.510.280	100	100
	5. Kegiatan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	104.078.080	104.078.080	100	100
	6. Kegiatan Pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak	54.053.400	54.052.400	100	100
	7. Kegiatan Peningkatan kapasitas perempuan	162.640.000	162.640.000	100	100
2	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	15.308.400	10.388.400	67,86	100
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	4.740.000	4.148.575	87,52	100
<b>JUMLAH</b>		<b>546.322.760</b>	<b>538.751.255</b>	<b>98,61</b>	<b>100</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	58.198.560	54.612.480	93,84	100
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	26.632.200	26.417.000	99,19	100
<b>JUMLAH</b>		<b>84.830.760</b>	<b>81.029.680</b>	<b>95,52</b>	<b>100</b>

### 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

#### I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Pada SEKRETARIAT

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan jasa internet kantor.
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 56 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD, telah berhasil melakukan penyediaan bahan pameran kandungan ekspo dan pawai pembangunan tahun 2017.
- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah

- melakukan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
  - g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
  - h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.
  - i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
  - j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
  - k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
  - l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
  - m. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS
  - n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil melakukan perbaikan gedung kantor yaitu perbaikan lantai, dinding dan plafon kantor, pembuatan WC dan kamar mandi pada ruang kepala dinas.
  - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil membayar BBM untuk 4 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 4 buah kendaraan dinas.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun.

## **II. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG KELUARGA BERENCANA**

1. Program keluarga berencana
  - Kegiatan Pembinaan keluarga berencana, telah dilaksanakannya Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan serta Kegiatan Momentum yang berkaitan dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, diantaranya Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan, Manunggal TNI – KB – Kesehatan, yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memacu capaian kesertaan ber KB dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kegiatan ditingkat lapangan.
  - Kegiatan pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Kelompok Seminat dan Jejaring Akseptor KB Pria serta Temu Forum Pengelolaan Program KB Pria.
  - Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB ( DAK Fisik), dilaksanakan pembuatan pagar Balai Penyuluh Kecamatan Angkinang, Simpur, Kalumpang, dan Sungai Raya serta Pengadaan sarana BKB Kit, KIE Kit, Genre Kit dan pengadaan sarana Petugas Lapangan KB (sarana kerja PPKBD).
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
  - Kegiatan Forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah, telah dilaksanakannya Forum diskusi terarah Kesehatan Reproduksi Remaja yang merupakan media pendekatan persuasif, edukatif dan menggali pengetahuan para siswa sekolah lanjutan atas yang mengalami /mengarungi masa remaja. Forum diskusi terarah ini melibatkan narasumber dari

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Perwakilan BKKBN Provinsi KalSel.

- Temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, telah dilaksanakan kegiatan dengan melibatkan remaja dan orang tuanya.

### **III. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA**

1. Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
  - Kegiatan Pembinaan kelompok ketahanan keluarga, telah dilaksanakannya berbagai macam kegiatan seperti: Lomba Jambore Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten, Peringatan hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 23 Tk. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, Pembinaan Ketahanan Keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat serta Pembinaan Keluarga Harmonis.

### **IV. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
  - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dilaksanakan pembinaan kepada organisasi wanita dengan tujuan Meningkatnya fungsi dan peran organisasi wanita dalam pembangunan SDM terutama yang berkaitan dengan pembangunan gender yaitu pada acara Peringatan Hari Kartini.
  - Kegiatan Pembinaan Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dilaksanakannya pembinaan dan evaluasi Tingkat Provinsi di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara.
  - Kegiatan pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI), dilaksanakannya pembinaan dan evaluasi oleh Tim Teknis serta

evaluasi Tingkat Propinsi di Kecamatan Daha Utara.

- Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan, dilaksanakannya kegiatan Bedah Buku tentang Karakter Anak, Lomba ketangkasan anak dalam rangka peringatan Hari Anak, Kegiatan Kandungan Expo bagi organisasi wanita, serta senam massal pada peringatan Hari Ibu.
  - Kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakannya berbagai macam pelatihan serta lomba, serta penyuluhan untuk orang tua tentang dampak pornografi pada anak.
  - Kegiatan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak, dilaksanakannya
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat validasi data terpilah dari masing-masing SKPD.

## **V. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak, telah dilaksanakannya Deteksi dini Kekerasan Terhadap Anak, Peringatan Hari Anak Tahun 2017, Peningkatan kapasitas FAD, Sosialisasi dampak Pornografi di Internet, validasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pembentukan TPPO.
  - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ada pelaporan 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 10 kasus kekerasan terhadap anak berupa Visum sebanyak 6 kasus dan Diversi 4 kasus. Semua kasus yang dilaporkan melalui P2TP2A telah diterima dan ditangani.



**Tabel 2.2****Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2017</b>	<b>REALISASI 2017</b>	<b>CAPAIAN %</b>
1.	Tingkat penurunan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Indeks	2,60	2,4	108,33
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen	78,84	76,51	97,04
2.	Persentase rata-rata usia kawin pertama	Persen	49,14	50,97	103,72
3.	Persentase bina keluarga balita (bkb), bina keluarga remaja (bkr), bina keluarga lansia (bkl) yang aktif	Persen	32,13	28,50	88,7
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,16	60,38	95,59
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,79	89,08	99,21
6.	Persentase desa dan kelurahan Layak Anak	Persen	53,33	86,67	162,5
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100
8.	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	100
10.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		BB	BB	100
11.	Persentase temuan BPK/Inspektort yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain berkaitan dengan semakin meningkatnya permasalahan perempuan dan anak yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Selain itu adanya perubahan SOTK dan mutasi pejabat yang menangani kegiatan (PPTK) juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

1. Belum sepenuhnya diberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
2. Ratio Tenaga PLKB sangat rendah;
3. Kurangnya penyebaran Data dan Informasi Kependudukan dan KB;
4. Belum optimalnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Belum sepenuhnya memberdayakan seluruh potensi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Renja Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
- Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
- Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
- Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- Penyusunan Dokumen Keuangan
- Penyusunan Dokumen AKIP

4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah :

- Pembinaan Program KBKR
- Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat
- Partisipasi Anak

5. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan :

- Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat daerah

6. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan :

- Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

7. Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak :

- Pelayanan Pemenuhan Hak Anak

8. Program Peningkatan Perlindungan Anak :

- Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

9. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) :

- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana

10. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera :

- Pembinaan kelompok ketahanan keluarga
- Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan 3 (tiga) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan;
- b. Sub Bagian Keuangan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- c. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- d. Bidang Keluarga Berencana melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- g. Bidang Perlindungan Anak melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Rancangan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019–2023 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;

- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun Anggaran 2019;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019 mencakup 10 program dan 23 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			0			<b>Non Urusan</b>					
			0	0		-					
			0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>703.281.750</b>	
1	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai/ Predikat AKIP	0	0	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	67.200.000	Pendapatan Daerah
			0	0	1	4 Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	14.000.000	Pendapatan Daerah
			0	0	1	6 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	28.104.000	Pendapatan Daerah
			0	0	1	8 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	45.850.000	Pendapatan Daerah
			0	0	1	9 Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	500.000.000	Pendapatan Daerah
			0	0	1	22 Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	48.127.750	Pendapatan Daerah



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			0 0 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>350.085.500</b>	
			0 0 2 <b>14</b>	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	122.764.000	Pendapatan Daerah
			0 0 2 <b>24</b>	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	101.520.000	Pendapatan Daerah
			0 0 2 <b>31</b>	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	125.801.500	Pendapatan Daerah
			0 0 7	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP ; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah</b>	<b>80,21 angka;100 Persen</b>	<b>10.000.000</b>	
			0 0 7 <b>7</b>	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	14 buah	5.000.000	Pendapatan Daerah
			0 0 7 <b>8</b>	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	2 laporan	5.000.000	Pendapatan Daerah
			0 0 10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Indikator Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>728.217.050</b>	
			0 0 10 <b>38</b>	Pembinaan Program KBKR	Kabupaten	Jumlah kegiatan KBKR	5 kegiatan	66.591.800	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			0 0 10 39	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Kabupaten	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	3 kegiatan	66.481.500	-	
			0 0 10 40	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	5 kegiatan	559.993.750	-	
			0 0 10 41	Partisipasi Anak	Kabupaten	Jumlah kegiatan partisipasi anak	2 kegiatan	35.150.000	-	
			1	<b>Wajib</b>						
			1 9	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
			1 9 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase SKPD yang mengimplementasikan MoU tentang Pangarusutamaan Gender	36,84 Persen	55.767.500		
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1 9 18 15	Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat daerah	Kabupaten	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	14	55.767.500	-	
			1 9 22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan oleh P2TP2A	100 Persen	10.045.000		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)					
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
		persentase penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	1	9	22	1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Kabupaten	Cakupan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	100%	10.045.000	Pendapatan Daerah
			1	9	23		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK		Persentase SKPD yang mengimplementasikan pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	77,55 Persen	110.999.500	
		Kabupaten Layak Anak	1	9	23	2	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten	Jumlah instansi/lembaga (SKPD, BUMN, BUMD, Forum Anak, Swasta) yang mengimplementasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	38 instansi	110.999.500	-
			1	9	24		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	100 Persen	28.689.750	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		persentase penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	1	9	24	1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Kabupaten	Cakupan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	100%	28.689.750	Pendapatan Daerah
			1	16			<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
			1	16	26		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja		Median usia kawin pertama wanita (usia 16 - 20 Tahun); Persentase MKJP; Persentase Drop Out KB (DO-KB)	16 th ;3 Persen;10 Persen	359.014.900	
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita kawin pertama usia < 20 tahun terhadap total perkawinan	1	16	26	3	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kabupaten	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	250 org	48.361.000	Pendapatan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya peserta Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	1	16	26	7	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Kabupaten	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	34.612 PUS	310.653.900	-
			1	16	27		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera		Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif; Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	60 Persen	73.411.250	
5	Meningkatnya partisipasi keluarga yang aktif di kelompok kegiatan ketahanan	Persentase jumlah keluarga yang aktif di kelompok kegiatan ketahanan	1	16	27	1	Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	Kabupaten	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	180 kelompok	46.755.250	Pendapatan Daerah
6	Meningkatnya instansi terkait yang berkomitmen terhadap upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk	Persentase instansi terkait yang berkomitmen terhadap upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk	1	16	27	2	Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	Kabupaten	Jumlah profil kependudukan tingkat Kabupaten dan Kecamatan	12 buah	26.656.000	Pendapatan Daerah
											2.429.512.200	
									TOTAL			

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat. Dengan demikian *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan periode 2019, Rencana Kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, 5 Juli 2018

**Kepala Dinas PPKBPPPA**



**Drs. Hj. Is Susilastuti**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19601219 198503 2 006**

**PERUBAHAN RENJA SKPD  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2019**



**Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 12 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21556**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	Hal ii
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	21
<b>BAB IV   PENUTUP</b> .....	30



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) Tahun 2019 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Perubahan Renja Dinas PPKBPPPA Tahun 2019 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- t. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan serta merumuskan program

pembangunan tahun 2019, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan strategi dan kebijakan perumusan program dilakukan melalui evaluasi pembangunan sosial tahun lalu, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu yaitu untuk tahun anggaran 2017 dari 38 kegiatan yang direncanakan dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2017 :

**Tabel 2.1  
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017**

#### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada SEKRETARIAT Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Belanja Tidak Langsung 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan	3.761.917.000 1.473.561.000	3.375.794.133 1.211.070.685	84,57 82,19	100 100
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi/	2.173.500 64.800.000 16.920.000 9.841.500 8.150.000 24.517.100 9.925.000 1.851.000	2.075.550 32.075.449 9.661.900 9.822.700 8.150.000 24.517.100 9.925.000 1.851.000	95,49 49,50 57,10 99,81 100 100 100 100	100 100 100 100 100 100 100 100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	penerangan bangunan kantor				
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37.977.000	37.677.000	99,21	100
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000	1.995.000	92,36	100
	11. Penyediaan makanan dan minuman	9.405.000	8.730.000	92,82	100
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	298.300.300	298.300.300	100	100
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	30.570.000	29.150.000	95,35	100
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	38.350.000	34.439.000	89,80	100
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	69.423.400	69.299.000	99,72	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.500.000	49.818.662	94,89	100
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.952.000	2.952.000	100	100
<b>JUMLAH</b>		<b>5.915.293.800</b>	<b>5.217.234.479</b>	<b>88,20</b>	<b>100</b>

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG KELUARGA BERENCANA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program keluarga berencana				
	1. Kegiatan Pembinaan keluarga berencana	297.450.300	269.607.500	90,64	100
	2. Kegiatan Kemitraan antar lembaga dan institusi dalam pelayanan program	25.600.000	24.880.000	97,19	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Keluarga Berencana				
	3. Kegiatan Pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan	8.720.000	7.970.000	91,40	100
	4. Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat dan Petugas Lini	24.336.000	24.270.000	99,73	100
	5. Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB	964.000.000	827.470.000	85,84	100
	6. Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB	673.080.000	529.401.280	78,65	80
2	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				
	1. Kegiatan Forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah	17.981.760	17.776.800	98,86	100
	2. Kegiatan Capacity building pendewasaan usia perkawinan	5.319.020	5.238.900	98,49	100
	3. Kegiatan Temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja	9.813.020	9.497.100	96,78	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.026.300.100</b>	<b>1.716.111.580</b>	<b>84,69</b>	<b>97,78</b>

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri				
	1. Kegiatan Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	199.448.640	196.938.640	98,74	100
<b>JUMLAH</b>		<b>199.448.640</b>	<b>196.938.640</b>	<b>98,74</b>	<b>100</b>



**4. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				
	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12.603.200	12.603.200	100	100
	2. Kegiatan Pembinaan Desa P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	52.737.000	51.686.920	98,01	100
	3. Kegiatan Pembinaan KSI (Kecamatan Sayang Ibu)	19.652.400	19.652.400	100	100
	4. Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan	120.510.280	120.510.280	100	100
	5. Kegiatan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	104.078.080	104.078.080	100	100
	6. Kegiatan Pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak	54.053.400	54.052.400	100	100
	7. Kegiatan Peningkatan kapasitas perempuan	162.640.000	162.640.000	100	100
2	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	15.308.400	10.388.400	67,86	100
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	4.740.000	4.148.575	87,52	100
<b>JUMLAH</b>		<b>546.322.760</b>	<b>538.751.255</b>	<b>98,61</b>	<b>100</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	58.198.560	54.612.480	93,84	100
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	26.632.200	26.417.000	99,19	100
<b>JUMLAH</b>		<b>84.830.760</b>	<b>81.029.680</b>	<b>95,52</b>	<b>100</b>

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

#### I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Pada SEKRETARIAT

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan jasa internet kantor.
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 56 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD, telah berhasil melakukan penyediaan bahan pameran kandungan ekspo dan pawai pembangunan tahun 2017.
- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah

- melakukan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
  - g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
  - h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.
  - i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
  - j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
  - k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
  - l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
  - m. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS
  - n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil melakukan perbaikan gedung kantor yaitu perbaikan lantai, dinding dan plafon kantor, pembuatan WC dan kamar mandi pada ruang kepala dinas.
  - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil membayar BBM untuk 4 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 4 buah kendaraan dinas.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun.

## **II. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG KELUARGA BERENCANA**

1. Program keluarga berencana
  - Kegiatan Pembinaan keluarga berencana, telah dilaksanakannya Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan serta Kegiatan Momentum yang berkaitan dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, diantaranya Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan, Manunggal TNI – KB – Kesehatan, yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memacu capaian kesertaan ber KB dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kegiatan ditingkat lapangan.
  - Kegiatan pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Kelompok Seminat dan Jejaring Akseptor KB Pria serta Temu Forum Pengelolaan Program KB Pria.
  - Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB ( DAK Fisik), dilaksanakan pembuatan pagar Balai Penyuluh Kecamatan Angkinang, Simpur, Kalumpang, dan Sungai Raya serta Pengadaan sarana BKB Kit, KIE Kit, Genre Kit dan pengadaan sarana Petugas Lapangan KB (sarana kerja PPKBD).
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
  - Kegiatan Forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah, telah dilaksanakannya Forum diskusi terarah Kesehatan Reproduksi Remaja yang merupakan media pendekatan persuasif, edukatif dan menggali pengetahuan para siswa sekolah lanjutan atas yang mengalami /mengarungi masa remaja. Forum diskusi terarah ini melibatkan narasumber dari

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Perwakilan BKKBN Provinsi KalSel.

- Temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, telah dilaksanakan kegiatan dengan melibatkan remaja dan orang tuanya.

### **III. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA**

1. Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri

- Kegiatan Pembinaan kelompok ketahanan keluarga, telah dilaksanakannya berbagai macam kegiatan seperti: Lomba Jambore Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten, Peringatan hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 23 Tk. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, Pembinaan Ketahanan Keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat serta Pembinaan Keluarga Harmonis.

### **IV. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dilaksanakan pembinaan kepada organisasi wanita dengan tujuan Meningkatnya fungsi dan peran organisasi wanita dalam pembangunan SDM terutama yang berkaitan dengan pembangunan gender yaitu pada acara Peringatan Hari Kartini.
- Kegiatan Pembinaan Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dilaksanakannya pembinaan dan evaluasi Tingkat Provinsi di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara.
- Kegiatan pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI), dilaksanakannya pembinaan dan evaluasi oleh Tim Teknis serta

evaluasi Tingkat Propinsi di Kecamatan Daha Utara.

- Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan, dilaksanakannya kegiatan Bedah Buku tentang Karakter Anak, Lomba ketangkasan anak dalam rangka peringatan Hari Anak, Kegiatan Kandungan Expo bagi organisasi wanita, serta senam massal pada peringatan Hari Ibu.
  - Kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakannya berbagai macam pelatihan serta lomba, serta penyuluhan untuk orang tua tentang dampak pornografi pada anak.
  - Kegiatan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak, dilaksanakannya
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat validasi data terpilah dari masing-masing SKPD.

## **V. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak, telah dilaksanakannya Deteksi dini Kekerasan Terhadap Anak, Peringatan Hari Anak Tahun 2017, Peningkatan kapasitas FAD, Sosialisasi dampak Pornografi di Internet, validasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pembentukan TPPO.
  - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ada pelaporan 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 10 kasus kekerasan terhadap anak berupa Visum sebanyak 6 kasus dan Diversi 4 kasus. Semua kasus yang dilaporkan melalui P2TP2A telah diterima dan ditangani.

**Tabel 2.2****Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2017</b>	<b>REALISASI 2017</b>	<b>CAPAIAN %</b>
1.	Tingkat penurunan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Indeks	2,60	2,4	108,33
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen	78,84	76,51	97,04
2.	Persentase rata-rata usia kawin pertama	Persen	49,14	50,97	103,72
3.	Persentase bina keluarga balita (bkb), bina keluarga remaja (bkr), bina keluarga lansia (bkl) yang aktif	Persen	32,13	28,50	88,7
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,16	60,38	95,59
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,79	89,08	99,21
6.	Persentase desa dan kelurahan Layak Anak	Persen	53,33	86,67	162,5
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100
8.	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	100
10.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		BB	BB	100
11.	Persentase temuan BPK/Inspektort yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain berkaitan dengan semakin meningkatnya permasalahan perempuan dan anak yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Selain itu adanya perubahan SOTK dan mutasi pejabat yang menangani kegiatan (PPTK) juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

1. Belum sepenuhnya diberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
2. Ratio Tenaga PLKB sangat rendah;
3. Kurangnya penyebaran Data dan Informasi Kependudukan dan KB;
4. Belum optimalnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Belum sepenuhnya memberdayakan seluruh potensi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpolakan pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Perubahan Renja Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
  - Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
  - Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
  - Penyusunan Dokumen Keuangan
  - Penyusunan Dokumen AKIP
4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah :
  - Pembinaan Program KBKR
  - Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
  - Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat
  - Partisipasi Anak
5. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan :
  - Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat daerah
6. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan :
  - Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
7. Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak :

- Pelayanan Pemenuhan Hak Anak

8. Program Peningkatan Perlindungan Anak :

- Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

9. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) :

- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana

10. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera :

- Pembinaan kelompok ketahanan keluarga
- Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan 3 (tiga) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan;
- b. Sub Bagian Keuangan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- c. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- d. Bidang Keluarga Berencana melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- g. Bidang Perlindungan Anak melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 didiskusikan dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil pembahasan.

Pada rapat dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Kabupaten didapatkan kesepakatan terkait pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK. Selain itu pada rapat tersebut diperlukan perbaikan indikator yang sesuai dengan arah RPJMD daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD**

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019–2023 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk,

- Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun Anggaran 2019;
  - c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
  - d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS;
  - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2019 mencakup 10 program dan 23 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			0.00.2.08.01.007	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										10.000.000	9.610.000	(390.000)		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	0.00.2.08.01.007.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	-		SKPD	SKPD	12 buah	12 buah	5.000.000	4.700.000	(300.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
			0.00.2.08.01.007.8	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	-		SKPD	SKPD	15 laporan	15 laporan	5.000.000	4.910.000	(90.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
			0.00.2.08.01.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										703.281.750	643.832.850	(59.448.900)		
			0.00.2.08.01.001.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	48.127.750	44.545.200	(3.582.550)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
			0.00.2.08.01.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	67.200.000	63.600.000	(3.600.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
			0.00.2.08 .01.001.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	14.000.000	14.000.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			0.00.2.08 .01.001.6	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	28.104.000	28.104.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			0.00.2.08 .01.001.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	45.850.000	40.250.000	(5.600.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			0.00.2.08 .01.001.9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	500.000.000	453.333.650	(46.666.350)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			<b>0.00.2.08 .01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									<b>350.085.500</b>	<b>242.829.000</b>	<b>(107.256.500)</b>		
			0.00.2.08 .01.002.1 4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	122.764.000	80.239.000	(42.525.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			0.00.2.08 .01.002.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	101.520.000	94.520.000	(7.000.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			0.00.2.08 .01.002.3 1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	125.801.500	68.070.000	(57.731.500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
			<b>0.00.2.08 .01.010</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>728.217.050</b>	<b>623.679.900</b>	<b>(104.537.150)</b>		
			0.00.2.08 .01.010.3 8	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	-		Kabupaten	Kabupaten	5 kegiatan	5 kegiatan	66.591.800	54.937.900	(11.653.900)	-	-	
			0.00.2.08 .01.010.3 9	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	-		Kabupaten	Kabupaten	3 kegiatan	3 kegiatan	66.481.500	56.076.700	(10.404.800)	-	-	
			0.00.2.08 .01.010.4 0	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	-		Kabupaten	Kabupaten	5 kegiatan	5 kegiatan	559.993.750	483.315.300	(76.678.450)	-	-	
			0.00.2.08 .01.010.4 1	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	-		Kabupaten	Kabupaten	2 kegiatan	2 kegiatan	35.150.000	29.350.000	(5.800.000)	-	-	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
			<b>1.09.2.08 .01.018</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>										<b>55.767.500</b>	<b>38.497.500</b>	<b>(17.270.000)</b>		



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.09.2.08.01.018.15	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang responsif gender	Jumlah SKPD yang responsif gender	-		Kabupaten	Kabupaten	10	10	55.767.500	38.497.500	(17.270.000)	-	-
			<b>1.09.2.08.01.022</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>										<b>10.045.000</b>	<b>10.045.000</b>	<b>-</b>	
			1.09.2.08.01.022.1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	6 organisasi	6 organisasi	10.045.000	10.045.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
			<b>1.09.2.08.01.023</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK</b>										<b>110.999.500</b>	<b>92.724.300</b>	<b>(18.275.200)</b>	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
																		8
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	1.09.2.08.01.023.2	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah instansi yang mengimple mentasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	-		Kabupaten	Kabupaten	34 instansi	15 indikator	110.999.500	92.724.300	(18.275.200)	-	-	
			<b>1.09.2.08.01.024</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										<b>28.689.750</b>	<b>23.966.000</b>	<b>(4.723.750)</b>		
			1.09.2.08.01.024.1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah aksi anti kekerasan terhadap anak	Jumlah PATBM desa yang aktif			Kabupaten	Kabupaten	2 aksi	2 buah	28.689.750	23.966.000	(4.723.750)	Pendapatan Daerah	Pendapata n Daerah	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
			<b>1.16.2.08.01.026</b>	<b>Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja</b>										<b>359.014.900</b>	<b>4.521.712.500</b>	<b>4.162.697.600</b>		
4	Menurunnya a usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	1.16.2.08.01.026.8	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)		terpenuhinya dukungan kegiatan Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-			Kabupaten		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-	955.796.460	955.796.460		-	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
			1.16.2.08.01.026.4	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)		Terpenuhinya dukungan sarana prasarana pelayanan KB dan Penyuluhan KB	-			Kabupaten, Daha Utara		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-	1.085.159.000	1.085.159.000		-
			1.16.2.08.01.026.9	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)		terpenuhinya Alokasi bagi Pasangan Usia subur di Faskes KB	-			Kabupaten		26 Faskes KB	-	40.500.000	40.500.000		-
			1.16.2.08.01.026.10	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)		terlaksananya integrasi Program KKBPK di Kampung KB	-			FALSE		22 Kampung KB	-	985.600.000	985.600.000		-
			1.16.2.08.01.026.11	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)		Terlaksananya KIE KKBPK oleh PPKBD dan sub PPKBD di Desa/Posyandu	-			Kabupaten		148 desa	-	888.000.000	888.000.000		-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
																		8
			1.16.2.08.01.026.12	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)		Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta Media KIE BOKB	-				FALSE		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan /media KIE luar ruang	-	267.170.540	267.170.540		-
			1.16.2.08.01.026.3	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah aksi advokasi, konseling dan promosi KB KR	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	-		Kabupaten	Kabupaten	3 aksi	357 orang	48.361.000	39.978.600	(8.382.400)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
			1.16.2.08.01.026.7	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	-		Kabupaten	Kabupaten	34.467 PUS	34.612 PUS	310.653.900	259.507.900	(51.146.000)	-	-	
			<b>1.16.2.08.01.027</b>	<b>Program Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>								<b>73.411.250</b>	<b>63.008.650</b>	<b>(10.402.600)</b>				
			1.16.2.08.01.027.1	Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang aktif	-		Kabupaten	Kabupaten	132 kelompok	180 kelompok	46.755.250	41.302.750	(5.452.500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.16.2.08 .01.027.2	Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	Data kependudukan dan keluarga yang berkualitas	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	-		Kabupaten	Kabupaten	12 laporan	2 instansi	26.656.000	21.705.900	(4.950.100)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
JUMLAH													2.429.512.200	6.269.905.700	3.840.393.500		

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat. Dengan demikian *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan periode 2019, Perubahan Rencana Kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

Keberhasilan Perubahan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, 22 Juli 2019

**Kepala Dinas PPKBPPA**



**Drs. Hj. Is Susilastuti**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19601219 198503 2 006**

**LAMPIRAN**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
-																						
			<b>0.00.2.08.01.007</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								<b>10.000.000</b>	<b>9.610.000</b>	<b>(390.000)</b>								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat AKIP	0.00.2.08.01.007.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	-		SKPD	SKPD	12 buah	12 buah	5.000.000	4.700.000	(300.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			0.00.2.08.01.007.8	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	-		SKPD	SKPD	15 laporan	15 laporan	5.000.000	4.910.000	(90.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 laporan	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			<b>0.00.2.08.01.001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								<b>703.281.750</b>	<b>643.832.850</b>	<b>(59.448.900)</b>								
			0.00.2.08.01.001.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	48.127.750	44.545.200	(3.582.550)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			0.00.2.08.01.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	67.200.000	63.600.000	(3.600.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
																						5
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			0.00.2.08.01.01.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	14.000.000	14.000.000			Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	28.104.000	28.104.000			Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.01.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekniks Lainnya	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	45.850.000	40.250.000	(5.600.000)		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.01.9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Pelayanan Administrasi sesuai standar	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	500.000.000	453.333.650	(46.666.350)		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>0.00.2.08.01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								<b>350.085.500</b>	<b>242.829.000</b>	<b>(107.256.500)</b>								
			0.00.2.08.01.02.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	122.764.000	80.239.000	(42.525.000)		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			0.00.2.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	101.520.000	94.520.000	(7.000.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	-		SKPD	SKPD	1 tahun	1 tahun	125.801.500	68.070.000	(57.731.500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>0.00.2.08.01.010</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>728.217.050</b>	<b>623.679.900</b>	<b>(104.537.150)</b>							
			0.00.2.08.01.010.38	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	-		Kabupaten	Kabupaten	5 kegiatan	5 kegiatan	66.591.800	54.937.900	(11.653.900)	-	-	0 kegiatan	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.010.39	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	-		Kabupaten	Kabupaten	3 kegiatan	3 kegiatan	66.481.500	56.076.700	(10.404.800)	-	-	0 kegiatan	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			0.00.2.08.01.010.40	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	-		Kabupaten	Kabupaten	5 kegiatan	5 kegiatan	559.993.750	483.315.300	(76.678.450)	-	-	0 kegiatan	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1			0.00.2.08.01.010.41	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	-		Kabupaten	Kabupaten	2 kegiatan	2 kegiatan	35.150.000	29.350.000	(5.800.000)	-	-	0 kegiatan	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
			<b>1.09.2.08.01.018</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>								<b>55.767.500</b>	<b>38.497.500</b>	<b>(17.270.000)</b>							
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.09.2.08.01.018.15	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang responsif gender	Jumlah SKPD yang responsif gender	-		Kabupaten	Kabupaten	10	10	55.767.500	38.497.500	(17.270.000)	-	-	0	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>1.09.2.08.01.022</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>								<b>10.045.000</b>	<b>10.045.000</b>	<b>-</b>							
			1.09.2.08.01.022.1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	-		Kabupaten	Kabupaten	6 organisasi	6 organisasi	10.045.000	10.045.000		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Organisasi	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>1.09.2.08.01.023</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK</b>								<b>110.999.500</b>	<b>92.724.300</b>	<b>(18.275.200)</b>							
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	1.09.2.08.01.023.2	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah instansi yang mengimplementasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	-		Kabupaten	Kabupaten	34 instansi	15 indikator	110.999.500	92.724.300	(18.275.200)	-	-	0 instansi	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
																						5
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			<b>1.09.2.08.01.024</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										<b>28.689.750</b>	<b>23.966.000</b>	<b>(4.723.750)</b>						
			1.09.2.08.01.024.1	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah aksi anti kekerasan terhadap anak	Jumlah PATBM desa yang aktif			Kabupaten	Kabupaten	2 aksi	2 buah	28.689.750	23.966.000	(4.723.750)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 aksi	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
			<b>1.16.2.08.01.026</b>	<b>Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja</b>										<b>359.014.900</b>	<b>4.521.712.500</b>	<b>4.162.697.600</b>						
4	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	1.16.2.08.01.026.8	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	terpenuhinya dukungan kegiatan Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-			Kabupaten		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan		-	955.796.460	955.796.460		-	0 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1.16.2.08.01.026.4	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)	Terpenuhinya dukungan sarana prasarana pelayanan KB dan Penyuluhan KB	-			Kabupaten, Daha Utara		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan		-	1.085.159.000	1.085.159.000		-	0 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1.16.2.08.01.026.9	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	terpenuhinya Alokasi bagi Pasangan Usia subur di Faskes KB	-			Kabupaten		26 Faskes KB		-	40.500.000	40.500.000		-	0 Faskes KB	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1.16.2.08.01.0 26.10	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)		terlaksananya integrasi Program KKBPK di Kampung KB	-			FALSE		22 Kampung KB	-	985.600.000	985.600.000		-	0 Kampung KB	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.16.2.08.01.0 26.11	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)		Terlaksananya KIE KKBPK oleh PPKBD dan sub PPKBD di Desa/Posyandu	-		Kabupaten		148 desa	-	888.000.000	888.000.000		-	0 desa	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1.16.2.08.01.0 26.12	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)		Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta Media KIE BOKB	-			FALSE		11 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan /media KIE luar ruang	-	267.170.540	267.170.540		-	0 Balai Penyuluhan KKB Kecamatan /media KIE luar ruang	-	baru	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.16.2.08.01.0 26.3	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah aksi advokasi, konseling dan promosi KB KR	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	-		Kabupaten	Kabupaten	3 aksi	357 orang	48.361.000	39.978.600	(8.382.400)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 aksi	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.16.2.08.01.0 26.7	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	-		Kabupaten	Kabupaten	34.467 PUS	34.612 PUS	310.653.900	259.507.900	(51.146.000)	-	-	0 PUS	-	berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<b>1.16.2.08.01.0 27</b>	<b>Program Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>									<b>73.411.250</b>	<b>63.008.650</b>	<b>(10.402.600)</b>						

